HARIAN
GORONTALO POST
Pertama dan Terbesar di Gorontalo

Terverifikasi Faktual
Dewan Pers
No: 169/DP-Terverifikasi/K/IV/2018

www.gorontalopost.id

TERBIT SENIN- JUMAT | 12 HALAMAN | KAMIS, 29 OKTOBER | TAHUN 2026 | Rp. 10.000,-

https://digital.gorontalopost.id
https://gorontalopost.id

USUL PEMERINTAH

Mencuri Ikan Masuk Kategori Korupsi

JAKARTA -GP- Di tengah isu redefinisi korupsi yang tengah ramai dibicarakan buntut omongan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendorong pencurian ikan di laut serta praktik under invoicing dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, ya, melakukan under invoicing di bidang pertambangan, jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10).

Yusril mengatakan dua praktik ilegal itu sudah sangatlah jelas merugikan kekayaan bangsa Indonesia. Ia pun mengatakan UU Tipikor yang berlaku di Indonesia saat ini berpegang pada dua aspek, pertama pada unsur kerugian negara serta aspek perekonomian negara. "Nah, perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan," ucapnya. Yusril mengatakan dua praktik ilegal itu menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar tiap tahunnya.

Bersambung ke **Hal.2**

DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan

IKN Tiongkok

SAYA tiba di Beijing masih terlalu pagi: Senin lalu. Saat masih di Bandara Changi, sebelum berangkat tengah malam, saya sempatkan mandi di ruang tunggu. Anda sudah tahu: tiba di suatu kota terlalu pagi punya risiko; tidak bisa langsung masuk hotel --berarti tidak bisa mandi pagi.

Kali ini tidak ada yang menjemput saya di bandara Beijing. Janet dan suami sedang di Jakarta. Baru sekali ini saya harus dewasa --melakukan apa pun tanpa ada yang melayani.

Bersambung ke **Hal.2**

POLDA SITA 44 TON BATU HITAM

Dokumen Pengiriman Kemiri, Satu Tersangka Ditahan

FOTO: NATHARAHMAN/ GORONTALO POST.
KAPOLDA Gorontalo Irjen Pol Nurworo Danang, bersama jajarannya saat melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus batu hitam yang di amankan oleh personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).Rabu (28/10).

GORONTALO –GP- Setelah Polda Metro Jaya, Jakarta, membongkar penyeludupan mineral batu hitam dari Gorontalo sebanyak 54 ton beberapa hari lalu, Polda Gorontalo tak mau ketinggalan. Institusi yang kini dalam kendali Irjen Pol Nurworo Danang itu, baru saja menggagalkan upaya penyeludupan batu hitam dari Gorontalo ke Jakarta.
Sebanyak 44 ton batu hitam diamankan di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Bersambung ke **Hal.2**

PETI MAKIN MERAJALELA

Kerusakan Lingkungan di Saripi Kian Parah

GORONTALO - GP- Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Desa Saripi Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kian parah. Padahal aktivitas PETI yang berada di area perkebunan tebu milik PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo itu kerap ditertibkan petugas kepolisian.

Bersambung ke **Hal.2**

(FOTO: ROY/GORONTALO POST)
KERUSAKAN tanaman tebu akibat aktivitas PETI di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo kian parah, Selasa (27/10/2026)

GUBERNUR GUSNAR ISMAIL - WAGUB IDAH SYAHIDAH RH KEMBALI ROMBAK KABINET

37 Pejabat Dilantik, Diminta Bekerja Cepat dan Tepat

(FOTO: BAHRIAN/DISKOMINFO)
GUBERNUR Gorontalo Gusnar Ismail saat melantik dan mengambil sumpah 37 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk JPT Pratama, Administrator dan Fungsional.

GUBERNUR Gorontalo melantik dan mengambil sumpah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Administrator dan Fungsional. Prosesi pelantikan berlangsung dirumah jabatan Gubernur, Rabu (28/10). Sebanyak 37 pejabat yang dilantik.

RINCIANNYA tiga pejabat JPT Pratama, empat pejabat administrator dan 30 pejabat fungsional. Tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik diantaranya Ridwan Hemeto sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Risjon Sunge sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Amir Hamzah Hadju sebagai Kadis Kearsipan dan Perpustakaan.

Selanjutnya Pejabat Administrator yang dilantik diantaranya Heriyanto Uwete sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan, Albert Panigoro sebagai Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik di Biro Organisasi, Arfanseri Yusuf sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum dan Mohammad Rian sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi. Sedangkan para pejabat fungsional dilantik berdasarkan mekanisme perpindahan jabatan lain, pengangkatan pertama dan promosi kenaikan jenjang. Gubernur Gusnar menyampaikan pelantikan ini digelar dalam rangka mengisi kekosongan akibat dampak dari penyesuaian jabatan.

Bersambung ke **Hal.2**

Polda Sita 44 Ton Batu Hitam

dari halaman 1

Dalam kasus ini, kepolisian menetapkan satu orang tersangka berinisial MFR (34) yang merupakan warga Kabupaten Bone Bolango. MFR diduga berperan melakukan pengiriman secara ilegal material tambang tersebut. Modusnya dengan melakukan pemalsuan dokumen pengiriman barang. Dokumen untuk angkutan dua kontainer batu hitam tersebut berupa dokumen hasil pertanian, yakni komoditas kemiri, lengkap dengan dokumen pendukung karantina. Material tambang tersebut kemudian diamankan personel Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo pada 17 September 2026.

Barang bukti yang disita terdiri atas dua kontainer, masing-masing berisi sekitar 22 ton material batu hitam, dengan total muatan mencapai 44 ton.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurworo Danang, mengungkapkan perkembangan perkara itu dalam konferensi pers di Markas Komando (Mako) Ditpolairud Polda Gorontalo, Rabu (28/10). Ia menjelaskan, penyidikan berfokus pada dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pengiriman dan jenis barang yang diangkut menggunakan peti kemas. "Melalui Direktorat Polairud tengah menangani perkara terkait dugaan ketidaksesuaian dokumen dengan jenis barang yang diangkut menggunakan peti kemas," ujar Nurworo.

Menurut Kapolda, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pembuatan atau penggunaan surat yang isinya diduga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi untuk mendalami perkara tersebut. Selain menetapkan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan proses pengiriman dan aktivitas tersangka.

Barang bukti itu meliputi dua unit kontainer berisi material batu hitam yang dikemas dalam karung, satu sertifikat kesehatan tumbuhan antar area, satu unit telepon genggam, satu akun pengguna situs PTK Online atas nama MFR dan/atau pihak terkait, serta rekening atas nama MFR. "Telah disita sebanyak dua kontainer, masing-masing sebanyak 22 ton, sehingga total sebanyak 44 ton berisi material batu hitam," kata Nurworo. Hasil penyidikan sementara juga mengungkap bahwa pengiriman material tambang tersebut diduga telah dilakukan beberapa kali sebelum upaya pengiriman yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Anggrek. Berdasarkan keterangan Kapolda, pengiriman pertama tercatat pada 4 Juni 2026, disusul pengiriman kedua pada 8 Agustus 2026 dan pengiriman ketiga pada 1 September 2026. Ketiga pengiriman tersebut disebut berhasil mencapai penerima akhir. Selanjutnya, pada 12 September 2026, kembali dilakukan pengiriman menggunakan tiga kontainer. Penanganan terhadap pengiriman tersebut berlangsung pada 19 dan 20 September 2026 dan, menurut Kapolda, saat ini dalam penanganan Polda Metro Jaya.

Sementara itu, upaya pengiriman berikutnya berhasil digagalkan personel Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Gorontalo pada 17 September 2026. Dalam perkara yang ditangani Polda Gorontalo ini, MFR disebut sebagai pihak yang melakukan rangkaian pengiriman, sedangkan penerima barang masing-masing berinisial RH dan ASI. Atas dugaan perbuatannya, MFR disangkakan melanggar Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 20 undang-undang yang sama, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kapolda menyebut perkara tersebut memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun. Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik Ditpolairud Polda Gorontalo telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama atas nama tersangka MFR kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk diteliti lebih lanjut. Penanganan perkara kini berlanjut pada proses penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.**(tha)**

Kerusakan Lingkungan di Saripi Kian Parah

dari halaman 1

Bukanya berkurang, justeru kini aktvitas semakin menjamur. Dari hasil investigasi Gorontalo Post Selasa (27/10/2026), salah satu pemicu utama PETI Saripi kian aktif, lantaran karena diduga adanya bekingan dari salah seorang pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), HK alias Hamzah. Disisi lain, HK alias Hamzah merupakan terlapor kasus PETI Saripi di Mapolda Gorontalo maupun di Mapolres Boalemo, yang kini belum tertangani oleh dua Markas Polisi itu. Dugaan keterlibatan Hamzah dalam PETI Saripi, tertungkap saat Hamzah sedang melakukan aktivitas penggalian lubang tambang emas yang ada di lokasi perkebunan tebu PT PG Gorontalo. Di sekelilingnya juga ada sejumlah penambang lain yang sedang istirahat siang.

Ada juga beberapa penambang yang sedang mendulang emas. Hamzah saat itu mengaku pihaknya hanya sebatas mendulang emas saja. Padahal di lokasi tersebut terdapat talang dompleng yang informasinya dioperasikan setiap malam hari. Menurut Kepala Satpam PT Pabrik Gula Gorontalo Juliargi Kaminang saat diwawancarai, bahwa di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya pihaknya sempat bersitegang dengan Hamzah Kaiko dan anak buahnya sesama penambang. Penyebabnya yakni para penambang ilegal yang dipimpin Hamzah protes keras adannya larangan dari pihak petugas keamanan untuk membangun talang dompleng. "Saat kami melarang mereka bangun talang dompleng. Mereka marah bahkan Hamzah dkk menantang kami duel.

Ini menujukan bahwa Hamzah sudah tidak takut lagi dengan hukum. Hukum seperti diinjak-injak olehnya. Padahal jelas aktivitas PETI ini melanggar hukum UU Minerba. Apalagi PETI berada di tanah perusahaan pabrk gula. Dia juga sudah kami laporkan ke Polda dan Polres Boalemo terkait kasus PETI beberapa bulan lalu dan sampai hari ini kami masih menunggu tindaklanjut kepolisian,"ungkap Juliargi. Yang paling parah lagi, salah satu anggota Satpam perusahaan mendapat tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan dari salah seorang penambang. "Semua bukti-bukti berupa video penganiayaan sudah kami simpan. Ada juga bukti Hamzah dkk menantang kami untuk berduel bahkan mengancam menggunakan senjata tajam,"kata Juliangi. Sementara itu, di lokasi tambang emas tanpa izin yang lain, Gorontalo Post menemukan sejumlah wanita yang ikut melakukan aktivitas PETI.

Bahkan ada juga perempuan yang nekat masuk ke dalam lubang sedalam lebih dari 10 meter. Padahal struktur tanah perkebunan tebu sangat lembek dan mudah longsor. Hal ini praktis mengancam nyawa dari para penambang itu sendiri. Anton Salipu, salah satu penambang kepada Gorontalo Post, mengaku, ia dan rekan-rekanya tidak tahu siapa pemilik lahan yang dijadikan PETI tersebut. "Kami tidak tahu ini tanah siapa, pokoknya kami hanya menambang saja. Emas yang kami dapatkan dibagi kepada beberapa orang penambang serta pemilik mesin,"kata Anton.

Manager Publik Relation PT. PG Gorontalo Marthen Turu'alo menegaskan, saat ini upaya yang dilakukan untuk menekan masifnya jumlah PETI serta adannya aksi terror ke karyawan yang tinggal dalam komplek perumahan saripi yang notabene mereka juga merupakan warga desa saripi. Maka pihakhya akan membuat akses satu pintu menuju lahan perkebunan tebu.

"Jadi nantinya semua yang akan masuk ke wilayah perkebunan dapat dikontrol. Upaya yang kami lakukan yakni menutup akses jalan lain dan hanya ada satu pintu masuk keluar saja,"tegas Marthen.

Menurut Marthen, hal itu dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan dari potensi gangguan keamanan, intimidasi, teror dan aktivitas pertambangan ilegal. Upaya pengamanan tersebut menempatkan koordinasi pemerintah daerah, aparat terkait, pihak perusahaan, dan pemerintah desa sebagai unsur penting dalam menjaga kawasan HGU agar tidak kembali dimasuki aktivitas pertambangan ilegal. Menanggapi adannya protes dari penutupan jalan tersebut, Marthen mengakui bahwa jalan yang ditutup bukan akses jalan desa, kecamatan atau kabupaten, melainkan jalan yang dibuat oleh perusahaan dalam lahan sendiri.

Dijelaskan Marthen, dari hasil pertemuan Forkopimda Boalemo pada 30 September 2025 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Boalemo yang dipimpin langsung oleh Bupati Boalemo Rum Pagau. Hasil identifikasi dan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boalemo, bahwa semua lokasi-lokasi tambang ilegal yang diidentifikasi masuk dalam kawasan HGU milik PT Pabrik Gula Gorontalo.

Bupati Boalemo selanjutnya menegaskan bahwa sejak Selasa, 30 September 2025, tidak ada lagi aktivitas PETI di dalam kawasan HGU perusahaan tersebut. Tapi buktinya PETI di Saripi makin menjamur bahkan sulit diatasi. **(roy)**

IKN Tiongkok

dari halaman 1

Pasahal rombongan Disway Business Adventures Vol. 5 baru tiba di Beijing tengah hari. Saya punya waktu enam jam menunggu kedatangan mereka. Maka saya putuskan saja: ke Xiong An. Itulah IKN-nya Tiongkok. Sekitar satu jam dari bandara baru Daxing.

Bandara itu sendiri berlokasi di tengah-tengah antara Beijing-Tianjin-Xiong An. Ke mana pun ke tiga kota itu berjarak sekitar satu jam dari bandara Daxing.

Saya pernah ke Xiong An: delapan tahun lalu. Yakni ketika saya baru mendengar Tiongkok akan membuat kota baru masa depan sebagai ibu kotanya. Waktu itu saya hanya bisa melihat lahan kosong yang ditumbuhi tetanaman perdu liar. Dari jauh saya melihat seperti ada danau alami yang tidak indah sama sekali.

Ternyata itu memang bukan danau. Itu adalah embung besar untuk penampung air hujan agar tidak terjadi banjir. Saya ingin membandingkan kondisi Xiong An delapan tahun lalu dan sekarang.

Ada jalur kereta baru dari bandara ke Xiong An. Saya putuskan naik kereta itu saja. Saya pun cari-cari di mana stasiunnya: di lantai bawah tanah. Keretanya jurusan Beijing-Barat - Xiong An --bandara Daxing di tengah-tengah tiga kota itu.

Tiba di Daxing saya saksikan stasiunnya: baru. Besar. Sepi. Masih sedikit yang menggunakannya. Rupanya itu stasiun untuk masa depan Xiong An.

Saya langsung menuju lorong ke arah taksi.

"Bisakah antarkan saya muter-muter Xiong An? Setengah jam cukup?" kata saya kepada sopir taksi.

"Setidaknya satu jam," jawabnya. "Dari sini ke Kota Baru memakan waktu 20 menit. Baliknya nanti 20 menit lagi" tambahnya.

"好的。可以。谢谢. 走吧，" kata saya.

Dari halaman stasiun, Kota Baru itu belum tampak. Stasiun itu sendiri sudah dikelilingi banyak bangunan baru. Sudah bukan hanya stasiun. Sudah seperti kota kecil yang baru, modern dan bersih.

"Peta digital ini saya matikan saja ya?" tanya si taksi.

"Terserah".

Ia hanya mematikan peta. Tidak mematikan argometer. Berarti ongkosnya nanti berdasar argometer. Kami tidak satu kata pun membicarakan bagaimana pembayarannya.

Pembangunan kota Xiong An ini diputuskan tahun 2017. Sampai sekarang masih jauh dari jadi. Tahap satunya sudah dihuni: Hotel-hotel, convention center, pertokoan, restoran, satu kantor pemerintah pusat. Sudah seperti kota biasa. Lebih tertata. Lebih bertaman. Lebih berpohon. Ramai. Sehari sebelumnya ada penutupan acara besar yang diikuti 90 negara di situ. Di bagian lain Xiong An sedang dibangun kota modern. Dengan tower-tower tinggi. Beberapa BUMN besar punya gedung baru di situ: perusahaan listrik, kimia, dan keuangan. Mereka juga sudah mulai berkantor di situ.

Yang sedang dibangun adalah kampus empat universitas besar: Universitas Transportasi, Universitas Geologi, Universitas Sain Teknologi, dan Universitas Kehutanan/Lingkungan Hidup.

Nama resminya:

1). Beijing Jiaotong University（北京交通大学）

Universitas yang kuat di bidang transportasi, teknik perkeretaapian, teknik sipil, dan teknologi informasi.

2) University of Science and Technology Beijing（北京科技大学）.

Terkenal dalam bidang metalurgi, pertambangan, ilmu material, dan teknologi industri.

3). Beijing Forestry University（北京林业大学）

Berfokus pada kehutanan, lingkungan hidup, ekologi, dan pengelolaan sumber daya alam.

4). China University of Geosciences (Beijing)（中国地质大学（北京））

Mengkhususkan diri pada geologi, eksplorasi mineral, sumber daya bumi, dan ilmu kebumian.

Selebihnya masih banyak yang kosong. Atau sedang di bangun. Yang jelas kota baru ini kalah cepat dibanding IKN yang idenya datang lebih belakangan.

Xiong An memang ditargetkan baru jadi tahun 2035. Bahkan dianggap selesai yang sebenarnya di tahun 2050. IKN Tiongkok dibangun tidak kesusu --meski uang mereka berlebih-lebih.(*)

Mencuri Ikan...

dari halaman 1

Ia pun menyatakan bahwa permasalahan itu haruslah segera ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar ke depan. "Itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang, dan adalah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri," ujar dia.

Dengan begitu, Yusril pun mendorong revisi UU No. 31 Tahun 1999joUU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Ia menyebut perubahan itu semakin perlu karena berjalan beriringan dengan perubahan KUHP dan KUHAP Indonesia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelarasan antara UU Tipikor dengan UNCAC. "Dan kemudian juga sedang dibahas sekarang ini rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Jadi mau tidak mau itu harus ada sinkronisasi juga terhadap Undang-Undang Tipikor yang ada sekarang ini," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya melakukan kajian mendalam terkait pengertian tindak pidana korupsi.

Yusril menyatakan Prabowo meminta kajian itu merumuskan pengertian korupsi sesuai dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan nantinya kajian itu akan melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor yang dinilai berkapasitas membahas ini, termasuk mengundang para akademisi dan aktivis. Ia menyebut bahwa UU Tipikor di Indonesia belum direvisi sejak 2001 silam, sedangkan UNCAC telah diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 2006. Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara UU Tipikor dengan UNCAC. Dengan begitu,Yusrilpun mendorong revisi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Ia menyebut perubahan itu semakin perlu karena berjalan beriringan dengan perubahan KUHP dan KUHAP Indonesia.

"Dan kemudian juga sedang dibahas sekarang ini rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Jadi mau tidak mau itu harus ada sinkronisasi juga terhadap Undang-Undang Tipikor yang ada sekarang ini," ujarnya. **(net)**

37 Pejabat Dilantik,...

dari halaman 1

Olehnya Ia berharap para pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja dengan maksimal. "Saya berharap melalui pelantikan ini roda organisasi akan semakin berjalan apalagi kita sekarang merasakan adanya kekosongan jabatan di lingkungan sekretariat daerah, jika tidak segera diisi maka akan terjadi keterlambatan, olehnya yang sudah dilantik dapat bekerja dengan baik dan cepat" ungkap Gusnar. Khusus kepada pejabat Fungsional, disampaikan Gusnar saat ini Pemprov sedang merancang skema penugasan yang secara faktual bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tugas tambahan ini berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh para fungsional untuk nantinya memberikan kontribusi yang dinanti-nantikan oleh publik. "Saya minta jangan terjebak cuman urus RKA, kalau urusan itu saya yakin berhasil karena ada uangnya ada SPJnya selesai, tapi publik menantikan bukan itu, tetapi hasil dari itu, maka ini harus kita tata lebih jauh lebih baik lagi sehingga jabatan manajerial ditopang penuh oleh jabatan fungsional atau non manajerial,"kata Gusnar Ismail. **(tro/*)**

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO
GORONTALO POST

Penerbit	:	**PT. GORONTALO CEMERLANG**
Pembina	:	Dahlan Iskan
Komisaris Utama	:	Imawan Mashuri
Komisaris	:	Urief Hasan
Direktur Utama	:	Moh. Sirham
Direktur	:	Haryono
Direktur Marketing	:	Hariyanto Hamzah
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab	:	Jitro Paputungan

DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi:** Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, M Sonatha
Sekretaris Redaksi/HRD: Chicilia Noviastuti Arifin. **IT:** Luki

DIVISI ART & PERWAJAHAN
Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis:** Muhammad Syukri

DIVISI USAHA
Manager Keuangan: Elvin Ambo. Adriyanti Kadir **(adm)**. **Manager Iklan:** Hariyanto Hamzah.
Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh**. Pemasaran Koran:** Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya **(adm).**

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN
Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil:** Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial:** Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran:** Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

ALAMAT
Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa TImur.

Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan, atau saduran (dengan menyebutkan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan antara tiga sampai empat halaman A4 spasi 1,5 dalam bentuk softcopy dan menyertakan identitas diri. Redaksi berhak tidak menerbitkan tulisan yang terkirim, isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis. ■ Wartawan Gorontalo Post dibekali dengan kartu pers/surat keterangan ketika menjalankan tugas. ■ Jika ada kejanggalan baik tentang identitas atau tindakan wartawan dapat menghubungi redaksi Gorontalo Post.

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

Edukasi Siswa SDN 5 Tilango lewat Buku Tubuhku Milikku

GORONTALO -GP -Upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak terus dilakukan melalui edukasi sejak usia dini. Dosen dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Gorontalo memberikan edukasi kesehatan kepada 30 siswa kelas IV dan V SDN 5 Tilango, Kabupaten Gorontalo, melalui buku edukatif Tubuhku Milikku.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada periode Juni hingga Oktober 2026. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman anak mengenai perlindungan diri, batasan pribadi, serta langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Tim pengabdian terdiri atas Ketua Tim Nurmaningsih Ali Abdul, S.SiT., M.Keb., bersama anggota Selvi Mohamad, S.ST., M.Kes., Magdalena M Tompunuh, S.ST., M.Pd., dan Herman Priyono Luawo, S.Kep., Ns., M.Kep., serta mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

Dalam kegiatan ini, buku Tubuhku Milikku digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan pentingnya menjaga tubuh dan memahami hak atas diri sendiri. Materi disampaikan melalui buku bergambar dan bahasa sederhana agar mudah dipahami sesuai usia serta tahap perkembangan anak. Para siswa diajak memahami bahwa setiap anak berhak merasa aman, mengenali batasan pribadi, dan berani menolak sentuhan atau perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman. Selain itu, edukasi juga menekankan pentingnya menjauhi situasi yang tidak aman serta mencari pertolongan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti orang tua atau guru. Anak-anak juga diberikan pemahaman bahwa apabila mengalami kekerasan, mereka tidak boleh disalahkan dan berhak mendapatkan perlindungan. Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan pengukuran pengetahuan siswa melalui pre-test dan post-test. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai perubahan pengetahuan siswa setelah memperoleh materi edukasi.

Pemanfaatan buku Tubuhku Milikku diharapkan dapat membantu anak memahami konsep perlindungan diri secara lebih konkret.

Pendidikan mengenai batasan pribadi dan keselamatan diri sejak sekolah dasar dinilai penting sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran anak dalam mengenali situasi yang tidak aman. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, khususnya perlindungan anak.Kolaborasi antara institusi pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat terciptanya lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Pencegahan kekerasan seksual bukan semata-mata tanggung jawab anak untuk melindungi dirinya, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan sesuai usia, anak diharapkan semakin memahami hak atas tubuhnya, mampu mengenali situasi yang tidak aman, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan. **(ADV/roy)**

Dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo memberikan edukasi kesehatan kepada 30 siswa kelas IV dan V SDN 5 Tilango, Kabupaten Gorontalo, melalui buku edukatif Tubuhku Milikku.

El Nino Ancam Pasokan Pangan Jelang Nataru

Bank Indonesia bersama TPID Siapkan Langkah Strategis

GORONTALO -Ancaman El NiÃ±o kategori sangat kuat menambah tekanan terhadap pengendalian harga pangan di Gorontalo. Dengan inflasi tahunan mencapai 5,46 persen pada September 2026, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo memperkuat strategi menjaga harga, pasokan, dan distribusi pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan dan Idulfitri 2027.

Tekanan harga sudah terlihat pada komoditas yang dekat dengan konsumsi harian masyarakat. Cabai rawit menjadi salah satu penyumbang utama inflasi September, dengan andil 1,46 poin persentase. Secara kumulatif, inflasi Gorontalo sejak Januari hingga September 2026 tercatat 4,44 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana, pada jumpa media di kantornya, Rabu (28/10) mengatakan, situasi ini membuat ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi menjadi perhatian utama. Gangguan produksi akibat kondisi iklim, ditambah meningkatnya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), berpotensi memperbesar tekanan harga jika tidak diantisipasi sejak dini. BI dan TPID, lanjut Bambang menyiapkan langkah pengendalian melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui gerakan pangan murah (GPM), operasi pasar, dan bantuan pangan. Sementara untuk menjaga pasokan, pemerintah mendorong gerakan menanam atau Agro Mopomulo di pekarangan rumah, memperluas kerja sama antardaerah (KAD), serta mendukung penyediaan sarana produksi pertanian.

Kelancaran distribusi diperkuat melalui fasilitasi pengiriman pangan dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan.

Bambang Setya Permana

Adapun komunikasi efektif dijalankan lewat koordinasi TPID, rapat tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN, pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi belanja bijak dan diversifikasi pangan.

Penguatan strategi tersebut turut dibahas dalam forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) di Makassar, 23 Oktober 2026. Forum itu dihadiri Menteri Pertanian, anggota Dewan Gubernur BI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah se-Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi pengendalian inflasi di Kawasan Timur Indonesia, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan, memperlancar konektivitas distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.

Gorontalo sebelumnya memperoleh pengakuan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam TPID Awards 2026 atas kinerja pengendalian inflasi pada 2025. Capaian itu menjadi modal untuk memperkuat langkah menghadapi tantangan pasokan dan harga pangan ke depan. Namun, keberhasilan menjaga stabilitas harga akan sangat bergantung pada pelaksanaan langkah-langkah tersebut di lapangan, mulai dari kecukupan stok komoditas strategis hingga kelancaran distribusi dan kewajaran harga di tingkat pedagang.

Masyarakat diimbau berbelanja sesuai kebutuhan dan memanfaatkan pangan alternatif yang tersedia secara lokal. Pedagang dan distributor juga diharapkan menjaga kewajaran harga agar tekanan terhadap daya beli masyarakat dapat ditekan. **(tro)**

BSU Rp 900 Ribu Segera Cair

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya masih mempersiapkan teknis penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). â€œKita masih menyiapkan dan kita masih koordinasi dengan Kementerian Keuangan,â€ kata Menaker Yassierli, dikutip Rabu (28/10). BSU kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja pada kuartal IV-2026. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total Rp 900 ribu bagi setiap pekerja yang memenuhi ketentuan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).

BSU akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut diterima sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun. BSU kuartal IV-2026 diberikan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan secara terpisah setiap bulan. Pemerintah merencanakan penyaluran sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima pekerja yang memenuhi ketentuan mencapai Rp 900 ribu. Program tersebut menjadi salah satu stimulus ekonomi pemerintah untuk kuartal IV-2026.

Informasi resmi mengenai BSU dapat dipantau melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id. Jika laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi.

Kemnaker menegaskan bahwa kewaspadaan diperlukan agar pekerja tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker. **(jp)**

Menlu Singapura Temui Prabowo

Mendadak, Berlangsung Tertutup di Hambalang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung secara tertutup di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Rabu (28/10). Pertemuan itu dilakukan setelah sebelumnya Menlu Singapura diketahui mendadak tiba di Jakarta pada Selasa (27/10) dan mengirimkan permohonan untuk dapat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kemudian menerima permohonan pertemuan tersebut, yang akhirnya diadakan secara tertutup di Hambalang pada hari ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari ini "Sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar, tetapi tanya Pak Menlu saja pastinya ya," ujar Seskab Teddy dalam keterangan diterima di Jakarta pada siang hari ini.

Teddy menyebut pertemuan itu memperlihatkan bahwa di tengah berbagai agenda kenegaraan, Presiden tetap memberikan perhatian terhadap upaya menjaga hubungan baik dan memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat, khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, Menlu RI Arrmanatha Nasir telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam kesempatan itu dibahas sejumlah isu termasuk mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan Menlu Arrmanatha menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan penanganan karhutla yang dampaknya sampai ke negara tetangga, termasuk Singapura. Menlu RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara, termasuk Singapura, yang menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam pemadaman kebakaran hutan.

Namun, tawaran tersebut akan dipertimbangkan oleh otoritas terkait di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menlu Arrmanatha juga mengatakan Indonesia dan Singapura telah menyetujui pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memperkuat upaya bersama menangani karhutla serta dampaknya.**(antara/jpnn)**

KPK Usut Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum

Budi Prasetyo

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengungkap pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan negara di sektor cukai PT Djarum yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Dugaan awal dari penyidikan perkara ini terkait dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan cukai di PT Djarum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak terkait di Bea Cukai. "Semuanya masih didalami dalam penyidikan perkara ini, apakah ada temuan soal dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai atau seperti apa yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam cukai rokok tersebut. Nanti kami akan update terus perkembangannya," katanya. Sementara itu, ketika ditanya apakah KPK berpeluang memanggil pihak-pihak dari PT Djarum sebagai saksi, dia mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan lembaga antirasuah secara bertahap. "Ya, semuanya tentu nanti bertahap. Berproses penggeledahan, terus kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan kepada para pihak ataupun saksi-saksi,"ujarnya. Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Dalam satu sprindik tersebut, KPK telah menetapkan seorang tersangka. Sementara satu lainnya merupakan sprindik umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan**. (jpnn)**

Mahasiswa Bawa Lima Tuntutan

(FOTO: IST)

Mahsiswa membawa spanduk jumbo berisi kritik perusakan hutan di Indonesia, pada aksi demo yang berlangsung di Jakarta, Rabu (28/10) malam.

JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas dan mereka yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10). Komite SADAR merupakan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Diponegoro. Namun, massa tak bisa berdemonstrasi di area Bundaran HI.

Mereka tertahan di area depan Bank UOB, Jakarta karena terdapat blokade kepolisian. Mahasiswa terlihat mengenakan pakaian serbahitam dalam demonstrasi kali ini dan beberapa membawa bendera kampus. Mereka juga membawa berbagai poster dalam demonstrasi yang mengangkat tema Indonesia Sadar. Sejumlah mahasiswa terlihat mengacungkan tiga jari dan meneriakkan revolusi ke hadapan kepolisian penjaga demonstrasi. Beberapa sampai membawa poster berukuruan 3Ã—5 meter yang isinya keresahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili," demikian poster raksasa yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi. Lima tuntutan mahasiswa yakni:

1. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan. 2. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP. 3. Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. 4. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 5. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil. **(jpnn)**

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 39/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.05.03.1.000 92	PANNA DHAMMO ALDIE SANTOSO, dkk	-	30/12/1977	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 9141/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5360/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 40/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.05.03.1.012 20	PANNA DHAMMO ALDIE SANTOSO,dkk	-	09/06/2004	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 9143/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5370/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 38/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.02.13.1.002 90	MARIO NANDA VIRIYA, dkk	-	23/03/1983	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 9139/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5361/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 37/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.02.13.1.000 40	MARIO NANDA VIRIYA, dkk	-	18/05/1974	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 10259/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5895/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Cabang Gorontalo melalui perantara Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui e-Auction terhadap:

OBJEK LELANG :

NOVITA ADAM

No	URAIANBARANG/OBJEKLELANG	NILAILIMIT	UANG JAMINAN
1.	Dua bidang tanah dijual dalam satu paket terdiri dari : 1(satu) bidang tanah Pekarangan seluas 164 m2 berikut bangunan Toko dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Sebagaimana tertuang dalam SHMNo.859 Tercatat An. Novita Adam	Rp 559.500.000	Rp 55.950.000
2.	1 (satu) bidangtanahPertanian seluas303m2 berikut bangunan Rumah Tinggal dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak diDesa Bulotalangi Kecamatan Bulango TimurKabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Sebagaimana tertuang dalam SHM No. 860 Tercatat An. (Novita Adam,IyamAbdu lGani,MeyRindiAdam, Resya Nur Afni Adam,andika Adam,Moh. Naldi Adam,Gibran Adam)		

PELAKSANAANLELANG :

Cara Penawaran	:	Open Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id)
Hari / Tanggal	:	Kamis, 12 November 2026
Batas Akhir Penawaran	:	Kamis, 12 November 2026 Pukul10:00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan-Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo. Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 7 Kota Gorontalo. Ruang Lelang
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
PPN Pembeli	:	1.1% dari nilai Laku Lelang yang Wajib disetorkan ke rekening penjual (BRI) pada saat penyerahan sertifik atasli

PERSYARATANLELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan sertata tacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Gorontalo akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran, dan menguggah/mengupload bukti setor tersebut pada aplikasi lelang
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang ini, misal : bea lelang pembeli, BPHTB, dan denda-denda (PBB, Tagihan Listrik, Air, dll), PPN sebesar 1,1% yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan, menjadi tanggung jawab pembeli
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Khusus tanah pertanian berlaku ketentuan tanah absentee yang diatur dalam Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Untuk menghindari kendala dalam proses balik nama di kantor pertanahan setempat, peserta lelang wajib memahami ketentuan terkait tanah absentee dimaksud.
- Peserta lelang atau Pembeli dianggap dengan sungguh-sungguh mengetahui apa yang telah ditawar olehnya atas segala bentuk kekurangan / kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dikemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis / legal, dan tidak berhak untuk menolak dan menarik diri kembali setelah pembeli disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga
- Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, pemenang lelang wajib melakukan pelunasan lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan lelang, apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk. Branch Office Gorontalo atau KPKNL Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamudin No.7 Kota Gorontalo Telp. 0435 – 2010012

PERINGATAN:
Kepada para debitur dan pemilik-jaminan, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Gorontalo Jl. Nani nartabone No.22, Ipilo, Kec. Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 95711, Telp. CP :0852-40293179

Gorontalo, 29 Oktober 2026
PT BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
BRANCH OFFICE GORONTALO

ttd

KOMANG WAHYU W.P
BOH

Pemkab Evaluasi PUG

LIMBOTO - Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus membuktikan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) benar-benar diterapkan dalam pembangunan daerah, bukan sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan. Bupati Sofyan Puhi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan data dan bukti pelaksanaan program untuk menghadapi evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.

Bukti yang disiapkan mencakup perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, hingga upaya perlindungan perempuan dan anak. Data tersebut akan menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG Tahun 2025/PPE 2026 di Kabupaten Gorontalo. Instruksi itu disampaikan Sofyan dalam rapat virtual di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (27/10/2026). Wakil Bupati Tonny S. Junus turut mengikuti pertemuan tersebut.

Menurut Sofyan, perspektif gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan agar kebijakan dan program pemerintah menjawab kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara adil.

Komitmen ini kami wujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender pada program prioritas daerah, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,â€ ujarnya.

Ia menilai evaluasi kementerian menjadi kesempatan untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan PUG. Karena itu, seluruh pimpinan OPD dan jajaran teknis diminta mengikuti proses verifikasi secara serius, menyajikan data yang transparan dan akurat, serta menindaklanjuti masukan tim penilai.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, serta sejumlah pimpinan OPD dan jajaran teknis terkait.**(adv)**

(FOTO: DISKOMINFO)

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi didampingi Wakil Bupati Tony Yunus memimpin rapat virtual pengarusutamaan gender, di ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (27/10).

(FOTO: DOK-DISKOINFO)

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyambut peserta kemah satta tunas tahun 2026 di Bumi Perkamahan (Buper) Pramuka, Kelurahan Bongohulawa, Limboto.

Bupati Berbaur dengan Peserta KAST

Tanpa Sekat, Santap Malam Beralas Daun Pisang

LIMBOTO - Daun pisang menjadi alas makan malam Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama peserta Kemah Satya Tunas (KAST) 2026 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto. Jamuan sederhana itu mempertemukan pimpinan daerah dan peserta perkemahan dalam suasana akrab, tanpa sekat protokoler. Wakil Bupati Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo Roma Nasaru, serta Ketua Saka Bahari Haris Tome turut bergabung dalam jamuan tersebut. Sofyan, yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo, menyebut Bumi Perkemahan Bongohulawa sebagai lokasi strategis dan bersejarah bagi kegiatan kepramukaan, termasuk agenda berskala nasional.

KAST 2026 merupakan kolaborasi Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo dan Kwarcab Kabupaten Gorontalo. Sofyan berharap kegiatan tersebut dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang, dengan pengaturan waktu yang lebih optimal agar peserta bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara maksimal. Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena KAST 2026 menjadi angkatan pertama dalam sejarah pelaksanaannya. Kegiatan ini disebut telah tercatat di Kwartir Nasional (Kwarnas) dan dipantau Wakil Ketua Bidang Bina Muda Kwarnas. Sejumlah andalan nasional turut menyampaikan ucapan selamat melalui media sosial. Di balik jamuan makan beralas daun pisang, Sofyan menyampaikan pesan tentang filosofi pohon pisang yang dinilainya mencerminkan ketahanan hidup dan semangat berkarya. Ia mengaitkan filosofi tersebut dengan dorongan agar generasi muda terus berjuang meraih cita-cita dan berkontribusi bagi bangsa.

Penyambutan peserta turut dihadiri perwakilan Kwarcab dari seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, yakni Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Bone Bolango. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan di Bumi Perkemahan Bongohulawa. **(adv)**

HONDA MODIF CONTEST (HMC) 2026

Final Battle Disaksikan Puluhan Ribu Bikers

JAKARTA - Puncak ajang kreativitas modifikasi Honda Modif Contest (HMC) 2026 menghadirkan puluhan karya modifikator dari berbagai wilayah Indonesia. Mengusung tema #RideCreation, HMC menjadi wadah bagi ribuan karya modifikasi yang ditampilkan di sembilan kota. Puncak Final Battle HMC 2026 pun disaksikan langsung oleh puluhan ribu bikers Honda yang hadir pada gelaran Honda Bikers Day 2026 di Lapangan Pangsar (Panglima Besar Jenderal Sudirman), Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026). Sepanjang penyelenggaraannya di sembilan kota, HMC 2026 berhasil menampilkan 1.313 karya modifikasi sepeda motor Honda. Sebanyak 81 karya terbaik melaju ke final battle untuk memperebutkan gelar National Champion di tiga kategori utama. Pada kategori Matic & Cub, gelar National Champion diraih oleh Wory Modified melalui karya modifikasi Honda Blade dengan konsep Performance.

Sementara itu, gelar National Champion Sport diraih oleh Jason Vito Valentino melalui karya modifikasi Honda ST125 Dax berkonsep Neo Cafe Racer. Adapun gelar National Champion Ultimate diraih oleh Ajies Sabara melalui karya modifikasi Honda CB150R Streetfire dengan konsep Boardtracker. Penentuan para juara dilakukan berdasarkan penilaian tiga juri berpengalaman, yakni Hendra Cahyono dari Pap N Mam Modified, Agus Ficdiyanto dari Alpha Sierra Custom, dan Haris Fatchurahman dari Manasi Ride. Para juara nasional berkesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project (HRDP) yakni program pengembangan kreativitas modifikasi sepeda motor yang didampingi langsung oleh mentor modifikator berpengalaman. Melalui HDRP, para peserta dapat mengasah kemampuan dan mengembangkan ide menjadi karya modifikasi yang semakin berkarakter. General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM Andy Wijaya mengatakan, HMC merupakan wujud konsistensi perusahaan dalam memberikan ruang bagi modifikator dan pecinta sepeda motor Honda untuk mengekspresikan kreativitas serta mengembangkan potensi melalui karya modifikasi.

(FOTO: HONDA)

Puncak ajang kreativitas modifikasi Honda Modif Contest (HMC) 2026 menghadirkan puluhan karya modifikator dari berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mengapresiasi seluruh modifikator yang telah berpartisipasi dalam Honda Modif Contest 2026 dan menghadirkan karya terbaiknya. Bagi kami, HMC bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk bertukar inspirasi, mengembangkan kreativitas, dan memperkuat ekosistem modifikasi sepeda motor Honda di Indonesia. Melalui semangat Satu Hati kami ingin HMC dapat terus mendorong lahirnya karya-karya kreatif dengan karakter kuat serta menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya,â€ ujar Andy. HMC 2026 menghadirkan 9 kelas yang dapat diikuti para modifikator sesuai karakter dan gaya modifikasinya. Untuk kategori sepeda motor produksi tahun 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, All Sport (Naked & Fairing), dan Show Off. Sementara itu, kelas All Stock & Advance diperuntukkan bagi sepeda motor produksi di bawah tahun 2010. Melengkapi kelas tersebut, HMC 2026 juga menghadirkan Racing Style dan Free For All yang terbuka untuk seluruh kategori sepeda motor Honda. **(tro)**

Perkuat Pencegahan *Stunting*

Darmawan Minta Layanan Kesehatan Dasar Lebih Dioptimalkan

GORONTALO-GP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memperkuat langkah pencegahan stunting. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kasus sudah terjadi.

Wakil Ketua Komisi I Dekot, Darmawan Duming, mengatakan pemerintah perlu memastikan program pencegahan berjalan hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan dasar menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko stunting sejak dini.

"Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini dan jangka panjang. Pertama adalah upaya penurunan yang bisa

Darmawan Duming

dilakukan dengan perbaikan gizi, menjaga keaktifan Posyandu hingga pengecekan kesehatan ibu hamil dan bayi," jelas Darmawan. Ia meminta Pemkot mengoptimalkan peran Puskesmas dan Posyandu dalam melakukan pemantauan terhadap ibu hamil, bayi dan anak. Pemeriksaan secara rutin dinilai penting untuk mengetahui kondisi kesehatan serta tumbuh kembang anak sejak awal.

Darmawan juga menilai keterlibatan kader kesehatan dan keluarga perlu diperkuat. Sebab, pencegahan stunting tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh dan pemenuhan gizi anak di lingkungan keluarga.

Selain layanan kesehatan, Dekot mendorong pemerintah memperluas edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut dapat menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pola asuh dan sanitasi.

"Kalau hanya mengejar angka penurunan tanpa pencegahan, maka kasus stunting akan tetap muncul setiap tahun," tegasnya.

Ia juga meminta program bantuan pangan dan pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah dikawal agar tepat sasaran. Terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

"Stunting itu bukan sekadar isu kesehatan, tapi juga terkait kualitas generasi. Kalau ini tidak ditangani serius, kita akan menghadapi masalah SDM di masa depan," pungkas Darmawan. **(Adv)**

Robin Ajak Pemuda Maknai Sumpah Pemuda dengan Aksi Nyata

Robin Yusuf

GORONTALO-GP- Peringatan Hari Sumpah Pemuda perlu menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan sekadar agenda tahunan. Semangat yang diwariskan para pemuda pada 28 Oktober 1928 itu perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Robin Yusuf, mengatakan, nilai-nilai Sumpah Pemuda harus terus diresapi dan diterapkan di tengah masyarakat. Menurutnya, ikrar yang lahir dari Kongres Pemuda II tersebut menjadi pengingat pentingnya mengesampingkan perbedaan demi menjaga keutuhan bangsa.

"Dahulu para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan sumpah untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat inilah yang harus terus kita jaga dan tumbuhkan dalam kehidupan sekarang," jelas Wakil Ketua Komisi I Dekot itu,

Legislator muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, peringatan Sumpah Pemuda dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk semakin memperkuat rasa kebersamaan. Ia menilai, persatuan yang terbangun melalui perjuangan para pemuda terdahulu harus menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Menurut Robin, sejarah Sumpah Pemuda juga mengajarkan bahwa persatuan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui pengorbanan, tekad, dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Kita telah bersumpah untuk menyatukan bangsa dan tanah air. Karena itu, semangat persatuan harus terus dipelihara agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga," pungkasnya. (Adv)

(F. ISTIMEWA)

Rapat paripurna yang digelar Dekot di Aula I.

KNPI Diharapkan Jadi Wadah Strategis Pemuda

GORONTALO -GP- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bukan sekadar organisasi, melainkan ruang aktualisasi bagi generasi muda. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo Irwan Hunawa.

Irwan menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah, bukan hanya melalui aktivitas organisasi, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi dan agen perubahan.

"Pemerintah harus memberi ruang agar pemuda dapat berperan aktif. Masa depan daerah ini berada di tangan generasi muda," tegasnya.

Legislator partai Golkar itu juga, menggarisbawahi pesan Ketua Umum KNPI tentang perlunya pola pikir kewirausahaan di kalangan pemuda.

"Pesannya sangat jelas: pemuda harus mulai berpikir sebagai entrepreneur. Kita ingin anak muda bukan menjadi beban, tapi menjadi penggerak pembangunan," lanjutnya.

Irwan Hunawa

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa KNPI seharusnya menjadi jembatan antara pemuda dan pemerintah, sekaligus ruang untuk mengembangkan potensi diri. "Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mereka perlu terus mengasah kemampuan, mengikuti perkembangan zaman, dan menyiapkan diri untuk mengambil alih estafet kepemimpinan daerah," ujarnya.

Terakhir Irwan berharap kepengurusan baru KNPI Provinsi Gorontalo mampu menjadi mitra strategis dalam mendorong kemajuan daerah berbasis semangat kolaborasi antar pemuda. **(Adv)**

BANGGAR DALAMI DENGAN DETAIL

RAPBD 2027 Mulai Dibahas

RAPAT Badan Anggaran (Banggar) Deprov Gorontalo dengan TAPBD membahas RAPBD 2027.

PUNCAK BOTU -GP- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di awal pekan.

Pembahasan tersebut melibatkan anggota Banggar yang mewakili delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo. Agenda ini menjadi bagian penting dalam proses penelaahan rencana keuangan daerah guna memastikan penyusunan APBD 2027 berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang serius, transparan, dan mendalam. Setiap alokasi anggaran dinilai perlu dikaji secara cermat agar benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah dan tidak sekadar memenuhi tahapan formal penyusunan APBD.

Banggar juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap struktur anggaran, mulai dari program dan kegiatan hingga besaran alokasi anggaran yang direncanakan. Penelaahan secara terperinci diperlukan agar anggota Banggar memperoleh gambaran yang utuh mengenai arah penggunaan anggaran sekaligus dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.

Sementara itu, pembahasan bersama TAPD dan OPD difokuskan pada penelaahan struktur RAPBD secara menyeluruh, termasuk kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan.

Pimpinan Banggar menegaskan bahwa pendalaman secara rinci tetap dapat dilakukan terhadap program, kegiatan, maupun alokasi anggaran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, setiap catatan, pertanyaan, dan masukan dari anggota Banggar dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dinamika yang berkembang dalam pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses kelembagaan dalam menyelaraskan berbagai pandangan dan memastikan anggaran daerah disusun secara cermat. Berbagai masukan dari anggota Banggar diharapkan dapat memperkuat kualitas penelaahan, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. **(rmb)**

PELANTIKAN PEJABAT PEMPROV

Thomas Ingin Layanan Publik Meningkat

PUNCAK BOTU -GP- Ketua Deprov Gorontalo Thomas Mopili, menghadiri kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (28/10/2026), bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan dihadiri Sekda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

Kehadiran Ketua Deprov merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan serta pengembangan sumber daya aparatur.

Ketua Deprov Gorontalo Thomas Mopili menghadiri pelantikan pejabat Pemprov Gorontalo.

Pelantikan pejabat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, integritas, dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong agar setiap pejabat yang dilantik mampu bekerja secara optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. **(rmb)**

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II GORONTALO
Jl. K.H Notu Badu Nomor 71. Limboto, Gorontalo 96212, Telepon (0435)882097,

PENGUMUMAN
PENGUSULAN LOKASI PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIRGASI (P3-TGAI)
Nomor : SA0502/B/BWS1C/2026/1390

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai dari kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGAI Tahun Anggaran 2027 dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk teknis P3-TGAI.

Pengusulan lokasi P3-TGAI berasal dari DPR RI, Instansi Pemerintah Daerah (Dinas PU Provinsi, Kabupaten/Kota), dan masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Pendaftaran dilakukan secara *online*/aplikasi melalui *web* Portal Kementerian PU dengan alamat https://p3tgai.pu.go.id/usulan/, dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

TAHAP	Mulai	Sampai
Pengusulan Lokasi TA. 2027	26 Oktober 2026 Pukul 10.00 Wita	30 November 2026 Pukul 16.00 Wita
Evakuasi, verifikasi adminis-trasi dan validasi usulan lokasi	26 Oktober 2026 Pukul 10.00 Wita	30 November 2026 Pukul 16.00 Wita

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Gorontalo, 26 Oktober 2026
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo,

Ali Rahmat

SMPN 1 Limboto Peringati Sumpah Pemuda Lewat Festival Budaya

Parade Baju Adat dan Lomba Seni Tanamkan emangat Persatuan Siswa

GORONTALO-GP- Semangat Sumpah Pemuda tidak hanya dimaknai sebagai persatuan, tetapi juga melalui upaya mengenal dan melestarikan keberagaman budaya bangsa. Hal ini diwujudkan SMP Negeri 1 Limboto melalui Festival Budaya Baju Adat Nusantara yang berlangsung pada 26–30 Oktober 2026.

Festival yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa tersebut melibatkan seluruh siswa kelas VII hingga IX. Para siswa mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, mulai dari Gorontalo, Jawa, Bugis, Bali hingga Papua.

Kepala SMP Negeri 1 Limboto mengatakan, peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Anak-anak perlu memahami bahwa perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat bukan menjadi penghalang untuk bersatu," ujarnya, Rabu (28/10)

Ia menambahkan, penggunaan pakaian adat dalam festival tersebut tidak sekadar menjadi ajang penampilan, tetapi juga sarana pembelajaran agar siswa mengenal makna dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan Nusantara.

"Kami ingin anak-anak tidak hanya bangga memakai baju adat, tetapi juga memahami makna di baliknya. Ini adalah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.

Selain parade pakaian adat, festival tersebut diisi berbagai perlombaan, seperti baca puisi bertema patriotisme dan budaya, pidato kebangsaan, paiya lo hungolopoli, dana-dana, serta lomba lainnya.

Berbagai penampilan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengenal kekayaan tradisi Indonesia. Setiap kelas menghadirkan ciri khas masing-masing melalui busana dan penampilan yang ditampilkan. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, sekolah berharap siswa semakin memahami arti persatuan di tengah perbedaan, mencintai bahasa Indonesia, serta ikut menjaga warisan budaya Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa. **(Tr-76)**

AFC CHAMPIONS LEAGUE

PERSIB BANDUNG HAJAR MELBOURNE VICTORY

JAKARTA - Persib Bandung melanjutkan tren sempurna di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah menaklukkan Melbourne Victory. Duel Persib vs Melbourne Victory berakhir dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026). Balsa Sekulic menjadi bintang kemenangan setelah mencetak dua gol pada babak kedua.

Setelah menutup babak pertama dengan skor kacamata, Persib langsung tancap gas selepas jeda. Belum genap satu menit babak kedua berjalan, Balsa Sekulic berhasil memecah kebuntuan lewat penyelesaian apik setelah menerima umpan Danijel Loncar. Meski dikawal dua pemain belakang lawan, Sekulic mampu melepaskan tembakan yang membawa Persib unggul 1-0.

Sekulic akhirnya menggandakan keunggulan Persib melalui serangan balik. Umpan terobosan Berguinho dalam situasi dua lawan dua diselesaikannya menjadi gol kedua bagi Maung Bandung. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Hasil ini memastikan Persib mengantongi sembilan poin sempurna dari tiga laga dan tetap berada di puncak Grup E ACL Two.**(del/jpnn)**

(FOTO: PERSIB)
BALSA Sekulic tampil gemilang saat Persib Bandung menaklukkan Melbourne Victory pada matchday ketiga AFC Champions League Two (ACL Two).

FERMIN ALDEGUER

Cedera di Mandalika Absen di Malaysia

JAKARTA - Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer dipastikan absen dalam Grand Prix Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, 1 November mendatang. Nantinya Gresini Racing akan menurunkan jawara WorldSBK 2026 Iker Lecuona untuk menggantikan peran Aldeguer.

"Pembalap asal Spanyol tersebut akan absen lagi setelah kecelakaan yang dialaminya di Sirkuit Mandalika," tulis MotoGP, Selasa (27/8).

Pembalap rookie of the year 2025 tersebut mengalami crash kala tampil di Grand Prix Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada pertengahan Oktober lalu.

Kecelakaan tersebut membuat pembalap bernomor 54 tersebut mengalami retak di dasar tulang metakarpal pertama di tangan kanannya.

Fermin sebelumnya juga absen dalam grand prix Australia, meski kejuaraan yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island ditunda mengingat kondisi kabut tebal. Hingga kini, Gresini Racing belum mengkonfirmasi mengenai kapan pembalap jawara MotoGP Indonesia 2025 tersebut dapat kembali ke lintasan. (*)

Danamon
A member of KUFG

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. SME , selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dengan jasa pra lelang PT. Balai Lelang Bali (BLBI) akan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Internet. Cara Penawaran Secara Terbuka (Open Bidding) terhadap barang jaminan milik Penanggung hutang dan/atau debitur atas nama:

PT. SINAR SANTIKA SUKSES, Barang dilelang berupa :

• Sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tinggal dan bangunan Toko berikut segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya Sesuai SHM No.00024/ Kelurahan Tulad enggi, Luas 844m², tercatat atas nama Winarni Bukoi terletak di Jl. Mohamad A. Wahab, Kel. Tuladenggi, Kec.Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
(Nilai Limit Rp . 1.865.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 375.000.000,-).

Syarat-Syarat Lelang :
1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan **cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang** melalui internet dengan metode "**Open Bidding**" yang diakses pada alamat domain Portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id **Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;**
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	12 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	12 November 2026, pukul 09.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kpknl) Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamuddin No. 7, Kota Gorontalo Ruang Lelang
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta;
6. **Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;**
7. Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat
lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
9. Pengenaan BPHTB atas perolehantanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: PT. Balai Lelang Bali, Telp. (085100209999), atau KPKNL Gorontalo telp. 96128 (0435) 2010012, dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.Telp. (0411) 312745, 327859

Makassar , 29Oktober 2026
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
KANTOR WILAYAH 4 MAKASSAR
SME REMEDIAL MANAGEMENT

ttd

Yani Dhian Tri Fauzi
SME Recovery Manager

James Ricardo Diets
SME Recovery Officer

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 41/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.02.13.1.00521	SURYO HADI SANTOSA	GORONTALO	19/06/2019	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 10012/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5770/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 42/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.02.13.1.00924	SURYO HADI SANTOSA	GORONTALO	28/10/1994	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 9670/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5661/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
JL. P. KALENGKONGAN NO. 18 KEL. TENDA KEC. HULONTHALANGI
KOTA GORONTALO, GORONTALO - Telp. 0822-9358-3792

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 43/DI304-30.01/X/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.05.04.1.00078	SURYO HADISANTOSO LEE	-	04/05/2017	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 9669/2026
Nama Pemohon : DAHRI K YUSUF
DI 301 : 5665/2026

GORONTALO, 28 Oktober 2026
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
NASRUN AMPO, S.H.
NIP. 198405062006041002

Judol Incar Anak Muda, Polda Turun ke Sekolah

GORONTALO- GP - Ancaman judi online (Judol) dan penipuan digital menjadi perhatian Polda Gorontalo dalam melindungi generasi muda dari kejahatan di dunia maya. Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Polda Gorontalo memberikan edukasi kepada siswa SMK Negeri 1 Kota Gorontalo belum lama ini. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Marupa Sagala, S.I.K., S.H., M.H menekankan peningkatan kesadaran pelajar terhadap bahaya judi online serta berbagai modus penipuan digital yang dapat mengancam keamanan, mengganggu pendidikan, dan merugikan masa depan mereka. Dalam kegiatan itu, para siswa dibekali pemahaman mengenai dampak negatif judi online, mulai dari risiko kerugian finansial hingga terganggunya konsentrasi belajar dan hubungan sosial. Pelajar juga diingatkan agar tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan besar yang tidak masuk akal. Para siswa diimbau untuk lebih waspada terhadap tautan mencurigakan, tidak sembarangan membagikan data pribadi maupun kode rahasia, serta tidak mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan lembaga atau pihak tertentu tanpa melakukan verifikasi. Marupa juga menegaskan, upaya pencegahan kejahatan digital harus dimulai dari kesadaran setiap individu dan diperkuat melalui peran keluarga, sekolah, serta kepolisian. "Jangan sampai masa depan adik-adik kita rusak karena judi online atau menjadi korban penipuan digital. Fokuslah belajar, raih cita-cita, dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif," pesannya kepada para siswa. Ia juga mengajak para pelajar untuk berani menolak ajakan bermain judi online. Apabila menemukan dugaan penipuan atau aktivitas digital yang mencurigakan, siswa diminta tidak ragu meminta bantuan kepada orang tua, guru, maupun pihak kepolisian. **(roy)**

Satlantas Boalemo Klarifikasi Kritik Ops Patuh

BOALEMO-GP - Di tengah pelaksanaan Operasi Patuh Otanaha 2026, sebuah unggahan di media sosial (Medsos) Facebook, sempat mencuri perhatian publik. Akun atas nama Vadilla Laihan membagikan keluhan terkait penindakan petugas di Kecamatan Paguyaman, yang memicu berbagai persepsi di tengah masyarakat. Dalam postingan Medsos tersebut tertulis "Sebenarnya tilang itu tujuannya apa Bukannya demi keamanan masyarakat atau bagaimana Hanya perkara pajak mati sehari, sudah dimintakan uang tilang Rp 250 ribu. Mereka pikir, tidak susah mencari uang disaat musim panas begini? Polisi melakukan tilang hanya menyusahkan masyarakatâ€™. Menanggapi hal tersebut, tim dari Satlantas Polres Boalemo yang dipimpin langsung oleh para perwira pengendali, termasuk KBO Satlantas IPDA Akbar Maku, melakukan penelusuran dan klarifikasi mendalam di lapangan. Berdasarkan fakta objektif yang dihimpun, penindakan yang dilakukan oleh petugas di Kecamatan Paguyaman telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Kendaraan yang terjaring razia, terbukti melakukan beberapa pelanggaran kasat mata. Diantaranya, tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (Knalpot brong). Masa berlaku pajak kendaraan bermotor telah habis. Terkait isu adanya permintaan uang tilang (Pungutan liar) sebesar Rp 250 ribu, hasil investigasi dan klarifikasi mendalam memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Secara terbuka orang yang memposting berita tidak benar telah menyampaikan permohonan maaf melalui Medsos, atas unggahan yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kapolres Boalemo, AKBP Firman Taufik, S.I.K menegaskan, Operasi Patuh Otanaha 2026 bukan sekadar mencari-cari kesalahan pengendara, melainkan wujud nyata kepedulian Polri untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menyelamatkan nyawa masyarakat di jalan raya.**(kif)**

Penambang Ilegal Saripi Tebar Teror

Napi Lapas Kelas IIA Gorontalo mengikuti kegiatan Kemah Satya Tunas yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Bongo Hulawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu(28/10/2026).

Pembinaan Karakter dan Disiplin

Napi Juga Ikut Kemah Satya Tunas

GORONTALO - GP- Sebagai upaya peningkatan disiplin dan pembinaan karakter. Sepuluh Narapidana (Napi) atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo diikutkan dalam kegiatan Kemah Satya Tunas yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Bongo Hulawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu(28/10/2026). Kegiatan perkemahan ini berlangsung selama enam hari sebagai bagian pengembangan kepribadian bagi warga binaan. Keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan positif yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja sama, dan semangat kebersamaan. Pembina Kepramukaan Lapas Gorontalo Irfan Hamim mengatakan, bahwa kegiatan kepramukaan para peserta diharapkan mampu mengembangkan sikap saling menghargai, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun karakter yang lebih baik.

"Selama enam hari para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dirancang untuk melatih kemampuan bekerja sama, membangun jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat gotong royong," Ujar Irfan. Ia menyampaikan, keikutsertaan 10 warga binaan dalam Kemah Satya Tunas merupakan kesempatan berharga untuk membentuk karakter, melatih kedisiplinan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab melalui kegiatan kepramukaan.

Kepala Lapas Gorontalo Junaidi Rison terus mendorong pelaksanaan program pembinaan yang memberikan manfaat bagi warga binaan.

Menurutnya, partisipasi dalam Kemah Satya Tunas menjadi kesempatan bagi peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung, memperkuat mental, serta menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari**. (roy)**

Rusak Fasilitas Pabrik Gula, Karyawan Resah dan Ketakutan

BOALEMO, GP- Aksi sekelompok orang yang diduga penambang illegal di kawasan Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo nampaknya mulai menebar aksi teror. Menyusul adannya perusakan fasilitas milik PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo di tengah malam buta. Insiden yang terjadi pada Senin malam, 19 Oktober 2026, itu telah dilaporkan ke Polsek Paguyaman, dan saat ini tindaklanjut kepolisian ditunggu.

Berdasarkan laporan pengaduan yang dibuat Ismail Usman, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.17 WITA. Saat itu, Ismail mengaku sedang berada di pos keamanan bersama rekannya, Steven Oktavianus Ratag. Dalam pengaduannya, Ismail menyebut seorang pria bernama Hamzah yang tak lain merupakan coordinator penambang illegal di Desa Saripi datang ke pos keamanan dan kemudian melakukan aksi teror berupa ekstra gas kendaraan roda dua yang digunakannya. Setelah itu, Hamzah disebut keluar menuju jalan Trans Sulawesi. Sekitar lima menit kemudian, Hamzah kembali ke pos keamanan bersama sekitar 50 orang. Sekelompok orang yang diduga kuat sudah termakan provokasi, menurut keterangan pelapor, kemudian berteriak dan melempari jendela gudang PT PG Gorontalo menggunakan batu. Tak hanya itu, pipa dan selang yang berada di gudang perusahaan juga disebut menjadi sasaran perusakan hingga menimbulkan kerugian materiil bagi PT PG Gorontalo. Atas kejadian tersebut, Ismail mengaku langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Paguyaman pada 20 Oktober 2026. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan fasilitas perusahaan dan dugaan perusakan yang melibatkan sekelompok orang.

Salin memotong sejumlah pipa dan selang air, penambang illegal juga ikut memecahkan kaca kantor PT PG Gorontalo.

Kepala Satpam PT Pabrik Gula Gorontalo Juliargi Kaminang membenarkan kejadian tersebut. "Saat ini kami tinggal menunggu tindaklanjut dari pihak kepolisian untuk memproses sesuai hukum yang berlaku terhadap para pelaku terror dan perusakan fasilitas perusahaan. Sebab saat ini karyawan tinggal dalam perumahan kantor saripi yang juga merupakan warga desa saripi termasuk ibu-ibu dan anak-anak sangat resah dan ketakutan akibat adanya aksi teror ini. Harapannya ini menjadi atensi kepolisian karena pasti keselamatan kami terancam," tutup Juliangi. Sayangnya hingga berita ini dilansir, Kapolsek Paguyaman Iptu Irfan saat dikonfirmasi wartawan koran ini belum memberikan tanggapan. **(roy)**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG HAK TANGGUNGAN PT. BANK SULUTGO

PT. BANK SULUTGO dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang (*open bidding*) terhadap objek hak tanggungan dari debitur :

Debitur An. STIEN BARAKATI BAKARI

Sebidang tanah dengan luas 605 m2 berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 01195 berlokasi Jl. Deliana Hippy Lingk.I Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo tercatat An. Ismet Luawo.

Nilai Limit Rp. 329.000.000,- dan Uang Jaminan Rp. 65.800.000,-

Debitur An. RENALDY PRAMULYA LATJENGKE

Sebidang tanah dengan luas 215 m^2 berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No.825 berberlokasi Kel. Heledulaa Utara, Kecamatan Kota timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo tercatat An. Erman Latjengke

Nilai Limit Rp. 366.450.000,- dan Uang Jaminan Rp. 73.290.000,-

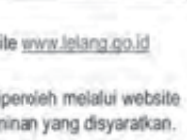

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Memilih objek lelang yang diikuti pada website diatas
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas, setelah memilih objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
4. Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui *Playstore* pada *smartphone* dengan nama lelang Indonesia.
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Pememang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan PMK 41 Tahun 2023 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan yang ada di PT.BANK SULUTGO (No. Rek. 000.00.211.02.01.001360 – PPN Tingkat I) paling lambat 5(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
10. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur sesusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL dan PT. BANK SULUTGO, termasuk juga bila terjadi pembatalan/ penundaan lelang.
11. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya.

Pelaksanaan Lelang

Hari/ Tanggal	:	Kamis 12 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang sd. batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran	:	12 November 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat domain	:	lelang.go.id
Tempat lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo Jalan Achmad Nadjamudin No.7 Kota Gorontalo
Penetapan pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Informasi lebih lanjut	:	PT. BANK SULUTGO Cabang Limboto & Capem Pasar Sentral CP. 081216094018/Irsyad 08124232524C/Riski 082290602590/Nabila 085256205208/Cris

Manado, 29 Oktober 2026
PT. BANK SULUTGO
Dept. Special Asset Management
TTD
IRMA F. MODJEPE
Pemimpin

BSG

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

SO SKARANG DEPE WAKTU TORANG BELI RUMAH & PEKARANGAN MELALUI LELANG INTERNET

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Cabang Gorontalo melalui perantara Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui e-Auction terhadap:

No	OBJEKLELANG
1.	**FIRDAUS LADITJI** 1 (satu) bidang tanah dijual dengan total luas 352 m2 berikut bangunan Rumah, dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Latorong Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dimana tertuang-dalam SHM No 0163 / Kel Kayubulan, tercatat An. Nyonya Nurhaya Mokoginta **(Limit lelang Rp450.000.000.- Uang jaminan Rp.90.000.000.-).**

PELAKSANAAN LELANG :

Cara Penawaran	:	Open Bidding
Hari / Tanggal	:	Kamis, 12 November 2026
Batas Akhir Penawaran	:	Kamis, 12 November 2026 Pukul10:00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan-Lelang	:	Jl. Achmad Nadjamudin Nomor 7 Kota Gorontalo KPKNL Gorontalo
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
PPN Pembeli	:	1.1% dari nilai Laku Lelang yang Wajib disetorkan ke rekening penjual (BRI) pada saat penyerahan sertifik atasli

PERSYARATANLELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan sertata tacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Gorontalo akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran, dan menguggah/mengupload bukti setor tersebut pada aplikasi lelang
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang ini, misal : bea lelang pembeli, BPHTB, dan denda-denda (PBB, Tagihan Listrik, Air, dll), PPN sebesar 1,1% yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan, menjadi tanggung jawab pembeli
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Khusus tanah pertanian berlaku ketentuan tanah absentee yang diatur dalam Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Untuk menghindari kendala dalam proses balik nama di kantor pertanahan setempat, peserta lelang wajib memahami ketentuan terkait tanah absentee dimaksud.
- Peserta lelang atau Pembeli dianggap dengan sungguh-sungguh mengetahui apa yang telah ditawar olehnya atas segala bentuk kekurangan / kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dikemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis / legal, dan tidak berhak untuk menolak dan menarik diri kembali setelah pembeli disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga
  Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, pemenang lelang wajib melakukan pelunasan lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan lelang, apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk. Branch Office Gorontalo atau KPKNL Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamudin No.7 Kota Gorontalo Telp. 0435 – 2010012

DEDDY CH BAKIR :
0853-9620-6664

Gorontalo, 29 Oktober 2026
PT BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
BRANCH OFFICE GORONTALO

ttd

Komang Wahyu Wedastra Putra
PemimpinCabang

Mengapa Anak Muda Selalu Kalah dalam Politik Gorontalo?

(Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke 98)

Oleh :
Dr. Funco Tanipu., ST., M.A

BONUS demografi terus dibicarakan dalam berbagai forum politik di Indonesia. Anak muda disebut sebagai penentu masa depan demokrasi, motor transformasi digital, dan kelompok pemilih terbesar dalam pemilu. Namun dalam praktik politik lokal, terutama di Gorontalo, realitas yang terlihat justru berbeda. Anak muda memang dominan sebagai pemilih dan sangat aktif dalam ruang digital politik, tetapi tidak dominan dalam struktur kekuasaan.

Dari sekitar 215 anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Gorontalo, hanya sekitar 40 yang dapat dikategorikan sebagai anggota legislatif muda. Artinya, keterwakilan politik generasi muda hanya berada pada kisaran 18 persen. Pada level eksekutif, kondisinya bahkan lebih ekstrem. Tidak ada kepala daerah muda yang benar-benar muncul sebagai representasi generasi baru dalam politik lokal. Figur-figur yang memenangkan pilkada tetap didominasi elite senior dengan jejaring politik, birokrasi, dan ekonomi yang telah terbangun dalam waktu lama.

Pada level nasional, situasinya tidak jauh berbeda. Dalam pemilihan DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Gorontalo, hampir tidak terlihat figur muda yang berhasil menembus kompetisi politik nasional secara signifikan. Politik representasi Gorontalo masih sangat didominasi oleh figur-figur senior dengan jaringan sosial dan politik yang sudah mapan.

Namun persoalan utama sebenarnya bukan semata-mata soal usia biologis. Tulisan ini juga tidak bermaksud membela anak muda secara romantik atau menganggap bahwa semua politisi muda otomatis lebih baik dibanding politisi senior.

Dalam banyak kasus pilkada di Gorontalo, kapasitas politik antara sebagian besar politisi muda dan elite senior memang masih berjarak cukup jauh. Elite senior memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi, jaringan sosial yang kuat, akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, serta tingkat kepercayaan publik yang relatif lebih mapan.

Selain itu, dalam konteks sosial Gorontalo, kepemimpinan politik tidak hanya diukur dari kemampuan administratif atau popularitas media sosial. Politik lokal juga sangat dipengaruhi oleh dimensi kultural dan adat. Di masyarakat Gorontalo dikenal istilah â€œdipo moodeloâ€ , yakni anggapan bahwa seseorang belum cukup matang atau belum memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk memikul tanggung jawab publik yang besar.

Konsep tersebut bukan sekadar soal usia, tetapi berkaitan dengan kemampuan membaca adat, memahami struktur sosial, menjaga relasi antarkelompok, dan menunjukkan kematangan dalam kepemimpinan publik.

Di tengah dominasi pemilih muda dan wacana besar tentang bonus demografi, politik lokal justru memperlihatkan gejala yang bertolak belakang. Demokrasi tampak semakin muda di permukaan, tetapi struktur kekuasaannya tetap dikendalikan oleh pola lama. Anak muda hadir di ruang digital, memenuhi arena kampanye, dan mendominasi daftar pemilih, tetapi tidak cukup hadir dalam distribusi kekuasaan.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa persoalan utama demokrasi lokal bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilu, melainkan siapa yang terus-menerus diberi akses untuk memimpin. Dalam konteks Gorontalo, masalahnya bukan sekadar minimnya kepala daerah muda, tetapi lemahnya regenerasi politik secara keseluruhan. Politik tidak dapat direduksi hanya pada kategori muda dan tua. Yang lebih penting adalah apakah demokrasi lokal mampu melahirkan kebaruan gagasan, keterbukaan politik, regenerasi kepemimpinan, pelimpahan kewenangan, dan pendelegasian kekuasaan kepada generasi baru.

Masalahnya, politik lokal masih bergerak dalam pola yang sangat tertutup. Kekuasaan berputar pada figur dan jaringan yang relatif sama. Partai politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi kaderisasi secara serius. Regenerasi lebih banyak bersifat administratif dan simbolik, bukan regenerasi substantif yang benar-benar memberi ruang bagi munculnya kepemimpinan baru.

Dalam situasi seperti ini, anak muda lebih sering diposisikan sebagai instrumen elektoral.

Mereka dibutuhkan sebagai relawan, operator media sosial, penggerak kampanye, dan pasar suara. Partai politik mulai membentuk organisasi sayap pemuda, tetapi sebagian besar masih diarahkan untuk kepentingan mobilisasi politik jangka pendek. Anak muda hadir dalam demokrasi, tetapi belum hadir secara penuh dalam pengambilan keputusan politik.

Pada saat yang sama, tingginya biaya politik membuat ruang kompetisi semakin sempit. Politik uang masih menjadi faktor penting dalam pilkada maupun pemilihan legislatif. Kandidat yang memiliki modal ekonomi besar, jaringan patronase kuat, dan akses terhadap elite partai memiliki peluang jauh lebih besar untuk menang dibanding kandidat yang hanya mengandalkan kapasitas, gagasan, dan kerja organisasi.

Karena itu, banyak anak muda yang berhasil masuk politik justru berasal dari keluarga pejabat, elite partai, atau pengusaha lokal. Regenerasi politik akhirnya lebih menyerupai reproduksi elite daripada pembukaan ruang politik yang meritokratis. Politik lokal terlihat mengalami pergantian generasi, tetapi struktur kekuasaan dasarnya tidak berubah. Akan tetapi, kritik tidak dapat hanya diarahkan kepada partai politik dan elite lama. Kaum muda sendiri juga harus dikritik secara terbuka. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa sebagian anak muda hanya ingin menikmati simbol politik modern tanpa membangun kapasitas politik yang memadai.

Banyak anak muda aktif di media sosial, tetapi tidak aktif dalam organisasi. Banyak yang vokal dalam komentar politik digital, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam kerja sosial, advokasi publik, atau pendidikan politik masyarakat. Politik dipahami sebatas ekspresi opini, bukan sebagai proses panjang membangun kapasitas, disiplin organisasi, dan konsolidasi sosial.

Sebagian anak muda juga terjebak pada orientasi politik yang sangat pragmatis. Politik dilihat sebagai jalan cepat menuju popularitas, jabatan, atau akses ekonomi. Akibatnya, muncul kecenderungan mencari jalan pintas melalui kedekatan dengan elite lama, bergabung dalam patronase politik, atau mengandalkan popularitas media sosial tanpa membangun basis sosial yang kuat.

Kondisi ini menyebabkan banyak politisi muda gagal tampil sebagai alternatif yang benar-benar berbeda. Mereka hadir dengan usia yang lebih muda, tetapi membawa pola politik yang sama: pragmatis, transaksional, minim gagasan, dan sangat bergantung pada elite. Dalam konteks seperti ini, tidak mengherankan apabila publik muda sendiri sering tidak sepenuhnya percaya kepada politisi muda. Masalah lain yang cukup serius adalah lemahnya tradisi intelektual dan gerakan sosial di kalangan anak muda. Ruang diskusi publik semakin sempit, organisasi kader melemah, dan aktivitas politik sering berhenti pada momentum pemilu. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan tidak ditopang oleh proses pembentukan kapasitas politik yang matang.

Jika kondisi ini tidak dipersiapkan secara serius sejak sekarang, maka pola politik Gorontalo kemungkinan besar tidak akan banyak berubah pada masa mendatang. Pada peringatan 100 tahun Gorontalo tahun 2042 nanti, atau setelah tiga kali pemilu dan tiga kali pilkada berikutnya, sangat mungkin struktur politik tetap didominasi pola yang sama: elite lama tetap kuat, regenerasi berjalan terbatas, dan anak muda tetap berada di pinggiran kekuasaan.

Karena itu, pembenahan politik kaum muda tidak cukup hanya dengan memperbanyak figur muda dalam kontestasi politik. Yang dibutuhkan adalah perubahan struktur politik secara lebih mendasar.

Partai politik harus kembali menjalankan fungsi kaderisasi dan distribusi kepemimpinan. Biaya politik harus ditekan agar kompetisi tidak hanya dimenangkan pemilik modal. Organisasi kepemudaan dan gerakan sosial harus diperkuat agar menjadi ruang pembentukan kapasitas politik jangka panjang.

Pada saat yang sama, anak muda sendiri harus keluar dari budaya politik instan. Politik membutuhkan kerja sosial, konsistensi organisasi, kapasitas intelektual, dan keberanian membangun gagasan. Tanpa itu, generasi muda hanya akan menjadi pelengkap demokrasi elektoral, bukan penggerak perubahan politik.

Masa depan demokrasi Gorontalo tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pemilih muda, tetapi oleh sejauh mana generasi muda dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk mengambil alih tanggung jawab politik secara substantif. (*)

Penulis adalah Founder The Gorontalo Institute

Sumpah Pemuda vs Sumpah Gen Z dan Gen Milenial

Oleh :
Mustamin Raga

SUMPAH Pemuda lahir bukan karena para pemuda Indonesia pada tahun 1928 tidak memiliki identitas, melainkan karena mereka mulai menyadari bahwa identitas yang dipertahankan tanpa kesadaran kebangsaan hanya akan membuat perjuangan berjalan sendiri-sendiri. Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Borneo, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya memiliki latar belakang kedaerahan yang berbeda. TurAsia Tenggara

Mereka tumbuh dengan kebanggaan terhadap tanah kelahirannya masing-masing, tetapi kemudian sampai pada satu kesadaran penting: penjajahan tidak akan berakhir hanya dengan keberanian yang berdiri sendiri-sendiri. Perjuangan membutuhkan persatuan sebagai kekuatan bersama. Sejarah telah memperlihatkan betapa mudahnya perlawanan yang terpecah dipatahkan oleh kekuasaan kolonial. Keberanian tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Pengorbanan tidak otomatis melahirkan kemerdekaan. Ketika kekuatan-kekuatan lokal bergerak tanpa koordinasi dan kesadaran bersama, penjajah memiliki ruang untuk memainkan perbedaan, memelihara kecurigaan, bahkan mempertajam pertentangan di antara sesama anak bangsa. Dari pengalaman panjang itulah tumbuh kesadaran bahwa persatuan bukan sekadar semboyan yang indah diucapkan, melainkan kebutuhan strategis untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

Pada 28 Oktober 1928, para pemuda menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Mereka tidak sedang menghapus Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Papua, atau identitas daerah lainnya. Mereka juga tidak sedang meminta setiap orang menanggalkan adat, bahasa ibu, dan kebudayaannya. Mereka justru sedang meletakkan seluruh keberagaman itu di bawah satu kesadaran yang lebih besar: bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling melemahkan. Indonesia dibangun bukan dengan menyeragamkan manusia, melainkan dengan menyatukan tujuan di tengah perbedaan.

Hampir satu abad kemudian, semangat itu tetap relevan. Namun, relevansi sebuah ikrar sejarah tidak cukup diukur dari seberapa meriah upacara peringatannya, seberapa lantang lagu kebangsaan dinyanyikan, atau seberapa banyak pejabat mengutip kalimat-kalimat patriotik di podium. Semangat Sumpah Pemuda seharusnya diuji dari cara negara memperlakukan warganya, cara kekuasaan menyikapi kritik, dan cara kekayaan nasional dibagikan kepada seluruh anak bangsa. BacaSejarah

Kolonialisme dalam bentuk penjajahan asing memang telah lama berlalu. Akan tetapi, ancaman terhadap persatuan tidak otomatis ikut terkubur bersama berakhirnya kekuasaan kolonial. Persatuan dapat retak bukan hanya karena hasutan dari luar, tetapi juga akibat ketidakadilan yang tumbuh dari dalam. Sebuah bangsa tidak selalu terpecah karena rakyatnya terlalu beragam. Terkadang, mereka terpecah karena keberagaman itu dikelola secara tidak adil, sementara sebagian merasa menjadi anak kandung pembangunan dan sebagian lainnya seperti anak tiri yang diminta terus bersabar.

Identitas kesukuan, kedaerahan, agama, dan kebudayaan tetap hidup hingga hari ini. Itu bukan masalah. Justru di situlah kekayaan Indonesia. Persoalan muncul ketika identitas berubah menjadi tembok egoisme, ketika kebanggaan terhadap daerah sendiri berkembang menjadi kecurigaan terhadap daerah lain, atau ketika perbedaan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Lebih berbahaya lagi apabila negara, yang seharusnya menjadi perekat keberagaman, justru melahirkan kebijakan yang membuat sebagian masyarakat merasa tidak memperoleh tempat yang setara di dalam rumah bernama Indonesia.

Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi pemerintah. Persatuan tidak bisa hanya dituntut dari rakyat, sementara kekuasaan merasa tidak perlu mengoreksi dirinya sendiri. Pemerintah yang tidak bijaksana, alergi terhadap kritik, dan lebih sibuk mempertahankan citra daripada memperbaiki keadaan sedang mempertaruhkan kepercayaan publik. Kritik yang disampaikan dengan niat memperbaiki bangsa bukan ancaman terhadap persatuan. Sebaliknya, menutup telinga terhadap kritik justru dapat membiarkan ketidakpuasan menumpuk sampai menemukan saluran yang lebih keras. CekLayanan

Persatuan juga tidak cukup dirawat dengan pidato tentang nasionalisme ketika distribusi kesejahteraan masih menyisakan persoalan mendasar. Bayangkan daerah-daerah yang menyimpan dan menghasilkan kekayaan alam bernilai sangat besar setiap tahun, tetapi masyarakat di sekitarnya masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kekayaan yang diambil dari tanah mereka mengalir jauh, sementara manfaat pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat setempat dianggap sudah memadai hanya karena tercatat dalam laporan anggaran.Dalam konteks Sulawesi, Maluku, dan Papua, persoalan semacam ini perlu dibicarakan secara terbuka dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kekayaan yang dihasilkan suatu daerah tidak serta-merta sama dengan penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah. Ada pembagian kewenangan, mekanisme penerimaan negara, biaya produksi, serta berbagai ketentuan fiskal yang harus diperhitungkan. Namun, semua penjelasan administratif itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanyaan substantif tentang keadilan: apakah masyarakat di daerah penghasil telah memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding, apakah mereka memiliki akses yang setara terhadap kesejahteraan, dan apakah suara mereka sungguh-sungguh diperhitungkan dalam pengambilan keputusan?

Sebab, nasionalisme tidak tumbuh subur hanya dengan meminta seseorang mencintai tanah airnya. Nasionalisme juga membutuhkan pengalaman nyata bahwa tanah air mencintai dan memperlakukannya secara adil. Sulit meminta masyarakat terus berbangga terhadap kekayaan nasional apabila mereka menyaksikan kekayaan itu melimpah di atas kertas, tetapi kehidupan di sekelilingnya tidak banyak berubah. Ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama dapat mengubah kebanggaan menjadi kekecewaan, kekecewaan menjadi keterasingan, dan keterasingan menjadi jarak emosional terhadap negara.

Jarak itulah yang harus diwaspadai. Persatuan yang hanya dipelihara melalui slogan akan mudah goyah ketika berhadapan dengan kenyataan hidup yang timpang. Sebaliknya, persatuan yang dibangun melalui keadilan memiliki akar yang lebih kuat karena setiap warga merasakan bahwa dirinya bukan sekadar bagian dari peta Indonesia, melainkan bagian penting dari masa depan Indonesia.

Maka, jangan terlalu cepat merasa aman hanya karena Sumpah Pemuda telah berusia hampir seratus tahun. Usia sebuah ikrar tidak menjamin keabadian nilai-nilai yang dikandungnya. Persatuan bukan warisan yang cukup disimpan dalam lemari sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus diperbarui oleh setiap generasi. BacaSejarah

Jika para pemuda 1928 merumuskan sumpah untuk menyatukan kekuatan yang tercerai-berai akibat sekat kedaerahan, generasi hari ini menghadapi ujian yang berbeda. Generasi Z dan generasi milenial tumbuh di tengah keterhubungan digital, keterbukaan informasi, dan kesadaran yang semakin kuat terhadap ketimpangan. Mereka dapat menyaksikan dalam hitungan detik bagaimana kekayaan suatu wilayah dikelola, bagaimana pejabat mengambil keputusan, bagaimana kritik ditanggapi, dan bagaimana ketidakadilan di satu daerah dibandingkan dengan kemajuan di daerah lain.

Mereka bukan generasi yang harus menerima setiap penjelasan penguasa tanpa memeriksanya. Mereka juga tidak harus memandang nasionalisme sebagai kewajiban untuk selalu setuju. Justru, ketika mereka mempertanyakan kebijakan yang dianggap tidak adil, menuntut transparansi, atau memperjuangkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, di situlah energi kebangsaan dapat menemukan bentuknya yang baru.

Namun, energi itu harus diarahkan untuk memperkuat Indonesia, bukan memecahnya. Tuntutan keadilan tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap sesama warga. Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya membuat kita kehilangan kemampuan membedakan antara negara, rakyat, dan penguasa yang sedang menjalankan mandatnya. Generasi baru perlu membawa semangat persatuan yang lebih kritis: bersatu tanpa harus membungkam perbedaan, mencintai Indonesia tanpa menutup mata terhadap kekurangannya, serta menghormati sejarah tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti melakukan koreksi. Di sinilah judul Sumpah Pemuda vs Sumpah Gen Z dan Gen Milenial menemukan maknanya. Kata versus tidak harus dimaknai sebagai pertarungan antara generasi terdahulu dan generasi sekarang. Ia merupakan pertemuan dua zaman yang membawa tantangan berbeda, tetapi berhadapan dengan persoalan mendasar yang sama: bagaimana menjaga Indonesia tetap utuh di tengah perbedaan dan ketidakadilan.

Sumpah Pemuda 1928 menyatukan cita-cita untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Generasi Z dan milenial mungkin kelak merumuskan sumpahnya sendiri: tidak membiarkan keberagaman diperalat, tidak membiarkan kekayaan nasional hanya dinikmati segelintir orang, tidak membiarkan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, dan tidak membiarkan keadilan berhenti sebagai janji dalam pidato. Jika sumpah semacam itu kelak lahir, penyebabnya tidak boleh dicari semata-mata pada perubahan watak generasi muda. Kita juga perlu memeriksa apakah negara telah cukup adil dalam memperlakukan mereka dan seluruh wilayah yang membentuk Indonesia. Sebab, ketika persatuan mulai dipertanyakan, yang perlu diperiksa bukan hanya kesetiaan rakyat terhadap bangsa, melainkan juga kesungguhan kekuasaan memenuhi janji kebangsaannya. Sumpah Pemuda tidak akan kehilangan makna karena generasi baru merumuskan sumpahnya sendiri. Ia justru akan kehilangan makna apabila generasi yang mewarisinya hanya sibuk merayakan sejarah, sementara membiarkan sebab-sebab yang dahulu membuat persatuan begitu penting tumbuh kembali dalam wajah yang berbeda. Indonesia tidak membutuhkan sumpah baru untuk menggantikan sumpah lama. Indonesia membutuhkan keberanian untuk menunaikan sumpah lama melalui keadilan yang nyata. Sebab, persatuan yang sejati bukanlah keadaan ketika semua orang dipaksa diam dalam satu barisan, melainkan keadaan ketika setiap orang, dari daerah mana pun ia berasal, merasa memiliki alasan yang sama kuat untuk berdiri bersama di bawah bendera yang sama. (*)

(FOTO: DOK)

JAJARAN anggota DPRD Bone Bolango saat melakukan agenda reses yang berlangsung baru baru ini dengan meninjau gerai Kopdes.

Pemda-Dekab Didorong Kompak Kawal Pembangunan

TILONGKABILA – Hubungan harmonis eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci kelancaran pembangunan daerah. Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Yakob Tangahu, mendorong kedua lembaga memperkuat komunikasi dan kemitraan agar program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Yakob Tangahu

Menurut Yakob, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibangun melalui komunikasi yang baik serta komitmen bersama dalam menjalankan agenda pembangunan. Ia menilai kekompakan antarpemangku kepentingan penting untuk menjaga arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, hubungan kemitraan kedua lembaga harus terus dipelihara, tanpa mengabaikan peran dan tanggung jawab masing-masing. "Marilah kita membangun sinergi pemerintahan yang solid," ujarnya. (csr)

Pembangunan Harus Berujung Kesejahteraan

Sofyan Wahidji: Kolaborasi jadi Modal Penting

TILONGKABILA – Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi arah utama pembangunan daerah. Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Wahidji, menyerukan agar seluruh pihak memperkuat kebersamaan dan menyatukan tekad untuk mendukung program pembangunan hingga akhir tahun.

Menurut Sofyan, kekompakan antarpihak menjadi modal penting untuk mengawal program prioritas pemerintah daerah, terutama yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan program yang telah direncanakan. Dibutuhkan komitmen bersama agar pelaksanaannya berjalan searah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

Sofyan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga semangat kebersamaan yang selama ini telah terbangun. Kekompakan tersebut diharapkan menjadi kekuatan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program sesuai prioritas pembangunan.

"Terus menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah. Itu harus dilandasi semangat dan tekad bulat untuk memajukan daerah," ujarnya. **(csr)**

Kawal Proyek APBD Agar Berdampak ke Rakyat

TILONGKABILA – Proyek pembangunan yang dibiayai APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik. Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zulkarnain Ruchban, menegaskan akan terus mengawasi realisasi pembangunan agar pelaksanaannya sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat. Pengawasan itu, menurut Zulkarnain, perlu diperkuat sepanjang 2026, terutama terhadap program fisik dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut pengawalan terhadap kebijakan pembangunan telah dilakukannya sejak tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk terus memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja.

Zulkarnain berharap pemerataan pembangunan tidak berhenti pada distribusi proyek, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. "Sehingga hasilnya ke depan mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan, karena kebijakan program pembangunan merata," ujarnya. **(csr)**

PPP KEMBALI BERGOLAK

Mardiono Pecat Waketum dan Sekjen DPP PPP

JAKARTA - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Ketua Umum DPP PPP Mardiono memutuskan memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa (27/10). Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.

"Rakornas Ketiga ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan Saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan H Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030," demikian bunyi keputusan tersebut. Ketua Mahkamah Partai DPP PPP versi Mardiono, Erfandi membenarkan keputusan pemberhentian Agus dan Taj Yasin. Ia mengklaim keputusan Rakornas tersebut merupakan tindak lanjut dari Mukernas yang digelar kubu Mardino di Makassar beberapa waktu lalu.

"Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif," kata Erfandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (28/10). Erfandi klaim persoalan itu bermula setelah sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menggugat ke Mahkamah Partai terkait keaktifan kedua pengurus tersebut. Mahkamah Partai kemudian memutuskan Agus dan Taj Yasin melanggar AD/ART partai serta meminta keduanya aktif hadir di kantor DPP dan mengikuti kegiatan partai.

Namun, menurut Erfandi, keduanya tetap tidak aktif atau belum menjalankan permintaan tersebut. Keputusan pemberhentian tersebut mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai langkah kubu Mardiono berpotensi memperpanjang konflik internal dan menghambat upaya pemulihan PPP. Menurut Iwan, perseteruan yang terus berulang menunjukkan bahwa elite PPP belum berhasil mengambil pelajaran dari perpecahan sebelumnya. Konflik antarkubu, kata dia, turut melemahkan kekuatan partai hingga PPP gagal mempertahankan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. "Kebesaran PPP di masa lalu hilang disebabkan oleh pimpinan mereka sendiri yang tidak bisa mengelola keberagaman yang ada di dalam tubuh partai. Saling pecat, mau menang dan berkuasa sendiri menunjukkan bahwa pimpinan PPP belum dewasa dalam berpolitik dan berorganisasi," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (28/10). Iwan menilai PPP masih memiliki peluang untuk bangkit dan memulihkan kekuatan politiknya.

Namun, upaya tersebut akan sulit dilakukan apabila konflik internal terus berlanjut dan menghambat konsolidasi organisasi. Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan meluasnya perseteruan hingga ke tingkat daerah. Menurut Iwan, jika konflik dan pemberhentian kader benar-benar terjadi di sejumlah wilayah, dampaknya dapat semakin melemahkan struktur organisasi serta basis dukungan partai. "Bahkan infonya sejumlah tokoh di daerah juga dipecat sebagai anggota DPRD dan kader partai. Jika betul ini terjadi, maka masa depan PPP akan semakin suram," ujarnya. Polemik terbaru ini kembali menempatkan soliditas internal PPP dalam sorotan. Di tengah upaya membangun kembali kekuatan partai setelah gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024, konflik kepengurusan menjadi tantangan tersendiri bagi PPP dalam mempersiapkan konsolidasi menuju Pemilu 2029, mendatang. **(jpnn)**

BPBD Sosialisasikan SIMPATI BENCANA di Dumbo Raya

GORONTALO – GP – Pengelolaan informasi kebencanaan di Kota Gorontalo mulai diarahkan menuju sistem digital yang terintegrasi. Melalui inovasi Sistem Manajemen dan Pusat Data Informasi Kebencanaan Terintegrasi (SIMPATI BENCANA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo berupaya membangun tata kelola data yang lebih modern, akurat, dan mudah diakses.

Langkah tersebut diawali melalui sosialisasi SIMPATI BENCANA di Kecamatan Dumbo Raya, Senin (26/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan camat, para lurah, serta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut.Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendry Ticoalu, mengatakan inovasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi kebencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Hendry, selama ini pengelolaan sejumlah data dan dokumen masih dilakukan secara manual, tersebar, serta belum sepenuhnya terhimpun dalam satu sistem. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembaruan dalam tata kelola informasi kebencanaan.

Melalui SIMPATI BENCANA, BPBD Kota Gorontalo berupaya mengintegrasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian data ke dalam sistem digital yang terstandar dan dapat dipantau melalui dashboard."Melalui penerapan SIMPATI BENCANA, proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian informasi kebencanaan diharapkan menjadi lebih tertata. Sehingga, data yang dibutuhkan dapat diakses secara lebih efektif untuk mendukung koordinasi antarlembaga maupun pengambilan keputusan," ujar Hendry.

Ia menjelaskan, keterlibatan aparatur kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem tersebut. Pasalnya, pemerintah di tingkat wilayah memiliki akses langsung terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana di daerah masing-masing.

Informasi tersebut mencakup data kewilayahan, potensi kerawanan bencana, kondisi lingkungan, serta berbagai keterangan lain yang diperlukan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

"Kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi kewilayahan, termasuk data potensi ancaman bencana, kondisi lingkungan, serta informasi lain yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana," tandasnya.Sosialisasi ini sendiri menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya standarisasi data. Sebab, kualitas informasi yang digunakan akan turut memengaruhi efektivitas koordinasi dan ketepatan pengambilan keputusan dalam menghadapi potensi bencana.

Hendry menambahkan, pengembangan SIMPATI BENCANA merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

"Melalui inovasi ini, kami berupaya memperkuat tata kelola informasi kebencanaan agar lebih modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi," katanya.**(adv)**

PERINGATAN SUMPAH PEMUDA KE-98

Wawali Tantang Generasi Muda Lahirkan Karya Nyata

(FOTO: PROKOPIM)

Wawali Indra Gobel pada kegiatan pemusnahan barang bukti yang diselenggarakan Kejari Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

GORONTALO - GP -Generasi muda dituntut tidak sekadar menjadi saksi perubahan zaman, tetapi tampil sebagai penggerak yang mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan karya nyata bagi kemajuan daerah.

Pesan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Menurut Indra, pemuda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri, mengasah kreativitas, serta berani mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

"Pemuda harus berani mengambil peran. Terus belajar, tingkatkan kemampuan dan tunjukkan karya nyata. Jangan hanya menjadi penonton di tengah perubahan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Indra juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi harus disikapi secara bijak. Menurutnya, kemajuan digital semestinya menjadi peluang bagi anak muda untuk berkembang, bukan justru dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif.

Ia berharap pemuda Kota Gorontalo mampu memaksimalkan potensi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Bangun kreativitas, kembangkan usaha, tingkatkan pendidikan dan ikut menjaga lingkungan serta ketertiban di daerah kita," katanya.

Selain mendorong kreativitas dan inovasi, Indra menilai persatuan tetap menjadi fondasi penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai perubahan. Perbedaan latar belakang, pandangan, maupun pemikiran, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama membangun daerah.

Semangat yang dicetuskan para pemuda pada 1928 harus terus hidup dalam sikap saling menghargai, memperkuat kebersamaan, dan menjaga keutuhan bangsa.

"Perbedaan jangan menjadi alasan untuk kita terpecah. Justru dengan perbedaan kita harus semakin kuat dan saling menghargai," tegasnya.

Indra menambahkan, Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai sektor pembangunan. Partisipasi pemuda dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing.

Ia berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi pemantik semangat bagi anak muda untuk terus berkontribusi melalui ide, inovasi, dan aksi nyata.

"Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98. Mari bersatu, bergerak dan berkarya untuk Indonesia, khususnya untuk Kota Gorontalo yang lebih baik," pungkasnya.**(adv)**

Indra Gobel Dorong Sinergi Forkopimda

Keamanan Daerah Jadi Prioritas

GORONTALO – GP – Kolaborasi lintas unsur menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Gorontalo. Karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo mendorong agar sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus diperkuat, terutama dalam mendukung penegakan hukum dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Menurut Indra, pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kerja sama antarlembaga dalam menjaga ketertiban di daerah.

"Pemusnahan barang bukti ini, menjadi salah satu bentuk nyata kerja sama antara pemerintah daerah dengan jajaran Forkopimda dalam menciptakan Kota Gorontalo yang aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Indra.

Ia menegaskan, Pemkot Gorontalo memiliki komitmen yang sejalan dengan unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang tanpa dibayangi gangguan keamanan.

Atas dasar itu, Indra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, yang terus menjalankan peran dalam mendukung ketertiban dan keamanan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Gorontalo, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Forkopimda yang terus bekerja menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat," tuturnya.

Indra berharap, koordinasi dan kerja sama yang telah terbangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus diwujudkan melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Ia juga memastikan Pemkot Gorontalo siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat sebagai bagian dari ikhtiar bersama menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.

"InsyaAllah ini menjadi bukti nyata dari kita semua, khususnya pimpinan Forkopimda dan Pemerintah Kota Gorontalo, untuk terus bekerja sama," tegasnya.**(adv)**

Kembangkan Layanan Terintegrasi bagi Lansia

Dinsos-PM Gandeng FIP UNG

GORONTALO – GP – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Gorontalo menggandeng Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (FIP UNG) untuk mengembangkan inovasi AIR LANSIA (Akses, Integrasi dan Respons Layanan Lanjut Usia).

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan sosial bagi lanjut usia (lansia) rentan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan inovasi tersebut dibahas Kepala Dinsos-PM Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, bersama Dekan FIP UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, beserta jajaran

Eladona Oktamina Sidiki

ketua program studi (Kaprodi). Dukungan FIP UNG diharapkan memperkuat pelaksanaan AIR LANSIA, khususnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari kelompok lansia rentan.

Dalam keterangannya, Eladona menjelaskan, kerja sama mencakup penguatan asesmen sosial, edukasi dan konseling, pendampingan psikososial, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesejahteraan sosial, serta pengembangan basis data agar pelayanan lebih akurat dan tepat sasaran.

Dukungan akademik FIP UNG ini, kata Eladona, relevan dengan program yang digagasnya tersebut.

"FIP memiliki sejumlah program studi yang dapat berkontribusi dalam pengembangan pelayanan sosial, yakni Psikologi, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, serta Bimbingan dan Konseling," kata Eladona.

Eladona berharap, keterlibatan bidang keilmuan tersebut dapat memperkuat pemahaman terhadap kondisi lansia, termasuk kebutuhan psikososial, dukungan keluarga, dan pendampingan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap keterlibatan FIP UNG dapat memperluas dukungan bagi lansia melalui penguatan peran keluarga dan jejaring pelayanan sosial.

"Keterlibatan FIP UNG diharapkan dapat memperkuat dukungan keluarga dan jejaring pelayanan, sehingga para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sejahtera dan bermartabat," lanjutnya.**(adv)**

(FOTO: PROKOPIM)

Wawali Indra Gobel menjadi Irup pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

POSISI KAS DAERAH PER 26 OKTOBER 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 25Oktober 2026		94.733.213.866,01
	Penerimaan Kas Daerah per 26 Oktober 2026	798.387.120,00	
	Pengeluaran Kas Daerah per 26 Oktober 2026	5.484.903.518,00	
II	Saldo Akhir per 26 Oktober 2026		90.046.697.468,01

Gorontalo, 27 Oktober 2026

PR. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

https://digital.gorontalopost.id

https://gorontalopost.id